REVITALISASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TUKANG BECAK TERHADAP EKSISTENSI TRANSPORTASI *ONLINE* PADA PENDEKATAN HUKUM NASIONAL DAN *MAQASHID AL-SYARI'AH*

Alfin Dwi Novemyanto¹, Yamuna Nurafifah²

^{1,2}Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Email: alfindwinovemyanto@mail.ugm.ac.id, yamunanurafifah@mail.ugm.ac.id

Abstrak. Kemajuan teknologi, khususnya transportasi *online*, meningkatkan efisiensi tetapi berdampak pada penurunan pengguna transportasi konvensional seperti becak. Akibatnya, kesejahteraan tukang becak terancam dan melanggar hak atas pekerjaan (Pasal 27 ayat 2 UUD 1945). Revitalisasi kesejahteraan mereka perlu dikaji dengan pendekatan hukum nasional dan *maqashid al-syari'ah* demi keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis perlindungan hak kesejahteraan sosial tukang becak dan kebijakan dalam memberikan perlindungan hak kesejahteraan sosial tukang becak demi terwujudnya keadilan sosial. Metode penelitian berupa metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis serta analisis deskriptif-analitis untuk merekomendasikan kebijakan berkeadilan sosial. Negara bertanggung jawab mewujudkan keadilan sosial dengan menyeimbangkan kemajuan teknologi transportasi dan perlindungan hak tukang becak. Transportasi *online* tidak boleh menyebabkan eksklusi sosial, tetapi harus diatur dengan regulasi berbasis kesejahteraan dan keadilan distributif. UUD 1945 dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menegaskan hak atas pekerjaan yang layak. Prinsip *good governance* menuntut kebijakan inklusif, seperti pelatihan keterampilan dan integrasi becak dalam ekosistem digital. Dalam perspektif *maqashid al-shariah*, regulasi harus melindungi kelompok rentan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas diperlukan agar kemajuan teknologi tetap berkeadilan.

Kata kunci: *Tukang Becak, Kesejahteraan Sosial, Hukum Nasional, Maqashid Al-Syari'ah*

Abstract. *Technological advancements, particularly in online transportation, have increased efficiency but have also led to a decline in the use of conventional transportation modes such as pedicab driver. Consequently, pedicab driver face threats to their livelihoods, violating their right to work as stipulated in Article 27(2) of the 1945 Constitution. Revitalizing their welfare must be examined through the lens of national law and maqashid al-shari'ah to ensure social justice and public well-being. This study aims to analyze the legal framework for protecting the social welfare rights of pedicab driver and assess policies that safeguard these rights to promote social justice. The research employs a normative juridical method with a statutory, conceptual, and historical approach, combined with a descriptive-analytical analysis to propose socially just policies. The state bears the responsibility of achieving social justice by balancing technological advancements in transportation with the protection of rickshaw drivers' rights. Online transportation should not lead to social exclusion but must be regulated under a welfare-based and distributive justice framework. The 1945 Constitution and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights affirm the right to decent work. The principle of good governance demands inclusive policies, such as skills training and the integration of pedicab driver into the digital transportation ecosystem. From the perspective of maqashid al-shari'ah, regulations must protect vulnerable groups. Collaboration between the government, private sector, and rickshaw driver communities is essential to ensuring that technological progress remains equitable and inclusive.*

Keynote: *Pedicab Driver, Social Welfare, National Law, Maqashid Al-Syari'ah.*

PENDAHUAN

Kemajuan teknologi telah menampakkan pengaruhnya pada segala bidang kehidupan masyarakat dan negara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya transportasi *online* yang menggunakan aplikasi pada smartphone sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi dalam mempermudah pemesanan pengoperasian transportasi, baik tarif maupun pembayaran. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Grab dan Gojek menjadi layanan transportasi *online* yang paling sering digunakan oleh masyarakat (Dimas Jarot Bayu 2020). Dengan diminatinya transportasi *online* berdampak pada proyeksi potensi pendapatan transportasi *online* dari US\$ 127,8 miliar pada 2017 menjadi US\$ 318,8 miliar pada tahun 2023 (Dwi Hadya Jayani 2019). Hal tersebut juga berakibat pada pangsa pasar jasa layanan transportasi *online* Indonesia yang meningkat, dengan data US\$ 1 miliar (2015), US\$ 5,7 miliar (2019), dan US\$ 18 miliar (2023). Dengan data-data tersebut pengguna jasa transportasi *online* akan terus meningkat dan banyak diminati karena sifatnya yang efektif dan efisien (Databoks 2023).

Perkembangan teknologi tidak selalu mendatangkan manfaat yang besar. Terdapat pula problematika-problematika yang timbul seiring dengan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di bidang transportasi

ternyata juga menimbulkan efek buruk. Salah satunya dengan perubahan moda transportasi menjadi transportasi *online*. Hal tersebut berakibat pada rendahnya peminat transportasi konvensional yang belum berbasis digital seperti tukang becak di beberapa daerah. Peralihan moda transportasi dari becak ke transportasi *online* telah berdampak signifikan bagi para tukang becak, yang kini semakin sulit mendapatkan penumpang dan mengalami penurunan pendapatan drastis. Banyak di antara mereka lebih sering menghabiskan waktu menunggu di pangkalan karena hanya mendapat satu atau dua penumpang dalam sehari (Bayu N 2021), sementara sebagian lainnya terpaksa mencari pekerjaan lain akibat sepi peminat becak (Baskoro. 2020). Kondisi ini bahkan berujung pada kisah pilu seperti yang dialami Pak Taat (78), yang hanya berpenghasilan Rp7.000 per hari hingga diusir oleh anaknya sendiri dan harus menumpang di rumah teman, bahkan terkadang tidak bisa makan (Ronald Seger Prabowo 2021). Nasib serupa juga dialami Mat Khoironi, yang dalam seminggu hanya memperoleh Rp50.000 karena berkurangnya penumpang akibat peralihan ke transportasi *online*. Di Grobogan, beberapa tukang becak bahkan pernah tidak mendapatkan satu pun penumpang dalam sehari (Chelin Indra Sushmita, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa modernisasi transportasi tidak hanya membawa kemudahan bagi masyarakat tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang berat bagi kelompok pekerja informal seperti tukang becak, yang semakin tersisih dalam arus perkembangan teknologi.

Pada negara hukum seperti Indonesia, peristiwa hilangnya sumber penghasilan tukang becak dan perlindungan atas hak mendapatkan pekerjaan sudah ditegaskan pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Akan tetapi dasar hukum tersebut belum bisa memberikan jaminan dan perlindungan atas perkembangan teknologi yang mengakibatkan hilangnya sumber kehidupan tukang becak. Hal ini mengakibatkan terabaikannya hak asasi manusia pada tukang becak dan tidak terimplementasinya keadilan sosial pada sila kelima Pancasila. Dengan adanya adagium *justitiae non est neganda, non differenda* yang berarti keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda, maka seharusnya fenomena tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah agar para tukang becak yang ada di wilayah NKRI mendapatkan kesejahteraan sosial sebagai harkat dan martabat kemanusiaan.

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung kesejahteraan sosial sebagai bentuk dari menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan implementasi dari hak asasi manusia. Pada hukum Islam tujuan dari hukum yaitu untuk memberikan jawaban atas kesenjangan yang ada. Diantara apa yang terjadi, kenyataan yang ada dan kondisi yang seharusnya. (Mawardi 2020). Selaras dengan tujuan dari hukum yaitu harus menjadi prinsip pokok dalam mengaplikasikan hukum itu sendiri. Hukum mempunyai sifat yang fleksibel, luwes, elastis, dan universal serta beriringan dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat (Susana Martínez-Rodríguez 2016). Dalam pembahasan hukum Islam tujuan dari hukum itu diinterpretasikan dengan teori *maqasid syari'ah* (Mawardi 2020).

Teori *maqasid syari'ah* dalam Islam dipelajari secara mendalam oleh para ahli hukum Islam dengan berbagai macam sudut pandang sesuai dengan madzab yang dianutnya. Misalnya yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bermadzab Hambali, Izuddin ibn Abdissalam yang bermadzab Syafi'i dan Abu Ishaq Al-Syatibi dari madzab Maliki dan ahli hukum Islam yang lainnya. Ahli hukum Islam inilah yang menulis karangan-karangan mengenai hukum Islam dan tujuan dari hukum Islam misalnya mengenai prinsip kemaslahatan dan sebab-sebab yang berlandaskan dengan syari'at. Izzudin Bin Abdissalam berpendapat bahwa segala problematika yang ada dikembalikan dengan kaidah *i'tibaru al mashalih wa dar'u al mafasid* yang maknanya yaitu mencapai kemaslahatan dan mencegah datangnya kerusakan (Ahmad Muntaha AM dan M. Hamim HR 2013). Dalam kitabnya yang berjudul *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Izzudin Bin Abdissalam menegaskan perlunya saling menghormati hak individu tanpa memandang status mereka, Adapun redaksinya berikut ini (Abdissalam 1991):

اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - خَلَقَ الْخَلْقَ وَأَخْرَجَ بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ لِيَتَّقُوا كُلَّ طَائِفَةٍ بِمَصَالِحِ غَيْرِهَا، فَيَقُومَ بِمَصَالِحِ الْأَصَاغِرِ الْأَكْبَارِ، وَالْأَصَاغِرِ بِمَصَالِحِ الْأَكْبَارِ، وَالْأَغْنِيَاءُ بِمَصَالِحِ الْفُقَرَاءِ، وَالْفُقَرَاءُ بِمَصَالِحِ الْأَغْنِيَاءِ، وَالنُّظَرَاءُ بِمَصَالِحِ النَّظَرَاءِ، وَالنِّسَاءُ بِمَصَالِحِ الرِّجَالِ، وَالرِّجَالُ بِمَصَالِحِ النِّسَاءِ، وَالرَّقِيقُ بِمَصَالِحِ السَّادَاتِ، وَالسَّادَاتُ بِمَصَالِحِ الْأَرْقَاءِ، وَهَذَا الْقِيَامُ مُنْقَسِمٌ إِلَى جَلْبِ مَصَالِحِ الدَّارَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَوْ إِلَى دَفْعِ مَفَاسِدِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا.

Islam merupakan agama yang sangat mendukung kemajuan bagi umatnya, karena Islam merupakan ajaran yang mewajibkan bagi umatnya untuk belajar. Ini merupakan sebuah bentuk dukungan Islam bagi umatnya untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Selain itu Islam juga sangat melindungi hak masing-masing individu. Dalam kehidupan sosial, Islam sangat mengutamakan tercapainya kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan yang ditimbulkan. Perkembangan teknologi selain menimbulkan manfaat juga mendatangkan kerusakan berupa kerugian yang diterima oleh para tukang becak yang akibat dari ketidak seimbangan yang terjadi menyebabkan mereka harus menanggung kesulitan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup. Dibutuhkan suatu pengaturan baru, pembaharuan sistem, dan juga modifikasi dari kebijakan agar terjamin kemaslahatan bagi masyarakat secara umum.

Dengan adanya permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menggagas ide tentang revitalisasi kesejahteraan sosial tukang becak terhadap eksistensi transportasi *online* pada pendekatan hukum nasional dan maqashid al-syari'ah. Hal tersebut perlu diperhatikan karena dengan perkembangan teknologi agar bermakna

ibadah dan muamalah untuk memberikan perlindungan atas hak kesejahteraan sosial tukang becak. Selain itu gagasan ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis perlindungan hak kesejahteraan sosial tukang becak dan mengetahui kebijakan dalam memberikan perlindungan hak kesejahteraan sosial tukang becak demi terwujudnya keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur perlindungan hak kesejahteraan sosial bagi tukang becak, termasuk Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan berbagai regulasi terkait ketenagakerjaan serta perlindungan sosial. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori hukum yang berkaitan dengan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan *maqasid al-syari'ah* sebagai dasar pembentukan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk menelusuri dinamika perubahan regulasi dan kebijakan terkait transportasi konvensional serta transportasi *online* dalam rangka memahami pergeseran paradigma hukum dalam merespon perubahan sosial. Data penelitian akan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial bagi tukang becak di era digitalisasi transportasi.

PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Kesejahteraan Sosial Tukang Becak

Keberadaan tukang becak yang kehilangan pekerjaannya karena kehadiran moda transportasi *online*, maka dalam hal ini perlu adanya terobosan, modifikasi, dan pembaharuan akan kebijakan dan peraturan yang ada dari agar sesuai dengan fenomena sosial yang terjadi. Karena hilangnya pekerjaan tukang becak sama halnya telah melukai hak asasi manusia yang melekat. Padahal hak asasi tersebut wajib dilindungi, dihormati, dan dijamin oleh semua pihak baik masyarakat, pemerintah, maupun negara. Hal tersebut pun juga telah ditegaskan pada:

- Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945, yang menegaskan “Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
- Pasal 28 A UUD 1945, yang menyatakan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”
- Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Maqasid al-Syari'ah merupakan konsep yang dimanfaatkan untuk merumuskan hukum Islam dengan menjadikan tujuan dari penetapan hukum sebagai referensinya. Dalam hal ini yang dikedepankan adalah kemaslahatan umat (Moh Nasuka 2017). Tujuan dan sasaran yang termaktub dalam *maqasid al-syari'ah* adalah menambah dari kemaslahatan umat dan menekan sekecil mungkin timbulnya kerusakan (Hamdan 2016). Islam hadir untuk memberikan jaminan atas kemerdekaan individu supaya terhindar dari keterpaksaan yang berkaitan dengan persoalan sosial, ideologi, politik dan masalah agama.

Imam Ghozali merupakan salah satu ulama yang merumuskan *maqasid al-syari'ah* (Musdah Mulia 2010). Imam Ghozali merumuskan *maqasid al-shariah* dalam lima poin pokok. Hal ini untuk memperkuat bahwa ajaran Islam memang mengakomodir atas kemaslahatan manusia. Adapun rinciannya adalah Pertama, *Hifdz al-Nafs* yaitu Islam menjamin hak hidup dan keberlangsungan hidup manusia. Kehidupan merupakan hal yang dasar, tanpanya manusia tidak bisa beramal sholih dan beriman. Islam sangat menghargai kehidupan dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah yang menganugerahi kehidupan dan hanya Allah yang berhak untuk mencabut nyawa setiap mahluk yang ada di dunia ini. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara

kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Kedua, *hifdz al-Aql* adalah Islam memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan mengekspresikan diri. Hidayah, petunjuk dan ilmu pengetahuan merupakan sumber kemaslahatan dalam Islam. Karunia akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia memberikan manusia dapat berpikir dengan sebaik mungkin dalam menjalankan perannya sebagai penguasa di bumiNya. Akal yang memberikan perbedaan antara manusia dan makhluk yang lainnya. Posisi Islam dalam hal ini yaitu memberikan perlindungan atas akal yang telah dikaruniakan oleh Allah dan apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap akal, Islam juga berperan dalam memberikan hukuman atas pelanggaran yang terjadi.

Ketiga, *hifdz al-Din*, Islam memberikan hak kebebasan untuk meyakini agama. Hak dan kebebasan untuk berkeyakinan dan juga beribadah dengan keyakinan yang diyakininya. Islam juga sangat menghormati dan menjaga tempat-tempat ibadah baik dari umat Islam sendiri maupun dari agama yang lain. Ini bermakna bahwa Islam sangat hormat dan menghargai toleransi. Namun, terdapat batasan bahwa toleransi hanya untuk ruang lingkup *muamalah* bukan dalam hal *'ubudiyah*. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an Suat Al-baqarah ayat 256.

Keempat, *hifdz al-Nasl*, yaitu jaminan Islam terhadap hak dan reproduksi hal ini untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia. Disini Islam sangat menganjurkan manusia untuk menikah bagi umat Islam yang telah diberi kemampuan secara fisik, emosional dan juga finansial. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, keturunan dan juga harta.

Kelima, *Hifdz Al-Mal*, yaitu upaya Islam untuk memberikan jaminan terhadap hak harta dan property yang dimiliki oleh manusia. Termasuk di dalamnya berupa upah dan pekerjaan yang layak. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Islam memiliki nilai yang tegas tentang perlunya perlindungan hak perseorangan, dengan kehadiran perbuatan atas apa yang diciptakan dan diperbuat oleh manusia. Hal ini harus menjadi tolak ukur, bahwa dengan diberikannya ilmu dan pengetahuan yang memadahi pada diri manusia dengan dibuatnya produk aplikasi transportasi *online*, seharusnya juga harus memberikan kesempatan dan kebermanfaatannya bagi pesaingnya tanpa melukai hak mereka. Terabaikannya hak asasi manusia yang terjadi pada pesaingnya yaitu tukang becak, hal ini bisa dikatakan sebagai kerusakan di bumi. Maka dari itu, dengan kehadiran moda transportasi *online* seharusnya juga diikuti dengan dibuatnya kebijakan baru untuk memberikan perlindungan hak yang melekat pada tukang becak.

Perlindungan terhadap hak asasi yang melekat pada tukang becak ini dilakukan karena agar terjaminnya hak kesejahteraan sosial mereka dalam pemenuhan hidup. Kesejahteraan pada tukang becak merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan spiritual, sosial, dan material tukang becak dan keluarganya agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Apalagi pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga telah menegaskan tentang perlunya perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil pada setiap warga negara, serta mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dasar hukum tersebut menjadi momentum bahwa kehadiran hukum dan perundang-undangan bukan hanya melindungi konsumen dan pengemudi saja, tetapi juga harus memberikan jaminan pada tukang becak yang menerima dampaknya karena adanya moda transportasi *online* tersebut.

Rights of legal equality atau persamaan dalam hukum, supremasi hukum dan hak asasi manusia merupakan syarat dari konsep negara hukum (SF Marbun 2004). *Rights of Legal Equality* yang merupakan bagian dari asas *equality before the law* merupakan manifestasi dari negara hukum (*rechtstaat*) dengan perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*) (Lilik Mulyadi 2007). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum. Teori *equality before the law* dapat dicerminkan pada Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" (Arafat n.d.). Ini merupakan dasar perlindungan bagi tukang becak sebagai warga negara untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan demi terciptanya keadilan, kebermanfaatannya, dan kepastian.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan keseimbangan dalam regulasi sektor transportasi guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan eksklusivitas

sosial bagi kelompok masyarakat tertentu. Prinsip *good governance* menuntut pemerintah untuk bertindak secara transparan, akuntabel, dan responsif dalam mengakomodasi dinamika sosial akibat perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial bagi tukang becak harus didasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak-hak kelompok rentan. Implementasi regulasi yang tidak memperhatikan aspek ini dapat menimbulkan maladministrasi yang berakibat pada ketimpangan sosial dan diskriminasi ekonomi.

Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab dalam menyediakan sistem perlindungan sosial bagi seluruh warga negara, termasuk bagi tukang becak yang terdampak oleh perubahan kebijakan transportasi. Negara tidak boleh membiarkan mekanisme pasar bekerja secara bebas tanpa intervensi yang memadai untuk melindungi kelompok yang rentan terhadap perubahan struktural ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan transisi seperti subsidi, pelatihan keterampilan, atau integrasi sistem transportasi tradisional ke dalam ekosistem digital dapat menjadi solusi yang sejalan dengan asas keadilan distributif. Prinsip ini menegaskan bahwa distribusi manfaat dari kemajuan teknologi harus dilakukan secara adil agar tidak menciptakan kesenjangan yang semakin dalam di masyarakat.

Selain itu, dalam doktrin hukum hak asasi manusia, hak atas pekerjaan yang layak merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya (*economic, social, and cultural rights*) yang wajib dijamin oleh negara sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dalam konteks ini, negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk tidak melakukan intervensi yang merugikan (*obligation to respect*), tetapi juga berkewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) dan memenuhi (*obligation to fulfill*) hak-hak kelompok yang terdampak. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan di sektor transportasi harus memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan aksesibilitas bagi seluruh warga negara, termasuk tukang becak yang menghadapi marginalisasi akibat perubahan ekonomi digital. Jika negara gagal dalam memenuhi kewajibannya, maka kebijakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang telah diakui dalam hukum nasional dan internasional.

Kebijakan dalam Memberikan Perlindungan Hak Kesejahteraan Sosial Tukang Becak demi Terwujudnya Keadilan Sosial

Perlindungan hak kesejahteraan sosial pada tukang becak perlu dilakukan karena demi terjaminnya hak keberlangsungan hidup mereka. Dalam hal ini merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Karena keberadaan moda transportasi *online* seharusnya juga diikuti dengan dibuatnya kebijakan baru untuk memberikan perlindungan hak yang melekat pada tukang becak. Akan tetapi jika dilihat pada fenomena yang terjadi, masih banyak tukang becak yang belum terpenuhi haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebagai martabat kemanusiaan. Maka dari itu dengan adanya *maqashid al-shariah* dalam Islam diharapkan dapat memberikan payung hukum atas perlindungan hak asasi manusia yang melekat pada tukang becak agar memberikan terobosan baru, pembaharuan, dan modifikasi kebijakan atau peraturan yang ada demi terciptanya keadilan sosial yang ditegaskan pada sila kelima Pancasila.

Keberadaan transportasi *online* seharusnya juga dipertimbangkan dengan terobosan baru agar dapat berjalan dengan lancar antara kehadiran transportasi *online* dan tukang becak. Karena perkembangan teknologi seharusnya bukan semata-mata demi mencapai kemudahan, keefektifan, dan keefisiennya saja, akan tetapi teknologi tersebut juga harus dipertimbangkan dengan mengetahui dampak keberadaannya. Walaupun keberadaan moda transportasi *online* memberikan dampak yang baik dalam pembangunan negara, tetapi kesejahteraan dan keadilan sosial yang melekat pada hak tukang becak harus ditegakkan. Terdapat adagium yang menyatakan bahwa *Fiat justitia ruat coelum* atau *fiat justitia perezat mundus* yang berarti sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Hak tukang becak tersebut wajib diprioritaskan karena merupakan hak yang wajib untuk diberikan perlindungan, penghormatan, dan jaminan. Apalagi hak tersebut juga telah menjadi hak yang melekat pada diri seseorang sejak lahir.

Kesejahteraan tukang becak seharusnya perlu menjadi bidang utama dalam dampak adanya transportasi *online*. Keberadaan becak juga memberikan dampak positif sebagai transportasi yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran dan kebisingan. Maka perlu adanya pertimbangan dengan dukungan pekerjaan tukang becak dan pelestarian transportasi lokal dalam melestarikan warisan budaya. Dalam hal ini Islam mengajarkan tentang menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani, dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan pelaksanaannya digerakkan oleh iman dan akhlak (Muhammad Daud Ali 200AD). Memikirkan nasib tukang becak merupakan ibadah dan muamalah sesuai dengan ciri hukum islam tersebut. Karena dengan memikirkan kesejahteraan pada tukang becak, memiliki tujuan yang telah ditegaskan pula pada Pasal 3

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.”

Kesejahteraan sosial yang merupakan prioritas utama tukang becak dalam pemenuhan hidupnya, dapat dilakukan dengan melakukan beberapa cara demi terwujudnya keadilan sosial. Dalam hal ini dapat dilakukan oleh perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, maupun negara. Dalam UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan dapat dilakukan dengan penyelenggaraan. Hal tersebut ditegaskan pada pasal 6 yang menyatakan bahwa “Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- 1) rehabilitasi sosial;
- 2) jaminan sosial;
- 3) pemberdayaan sosial; dan
- 4) perlindungan sosial.”.

Adapun kemaslahatan yang dapat diupayakan yaitu sebagai berikut ini:

- a. Rehabilitasi terhadap tukang becak dapat dilakukan dengan memulihkan dan mengembangkan kemampuan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. Jaminan sosial pada tukang becak dapat berupa bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- c. Pemberdayaan tukang becak dilakukan untuk meningkatkan peran tukang becak sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. Sedangkan untuk perlindungan sosial dalam tukang becak berupa pencegahan dan penanganan risiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Akan tetapi keberadaan transportasi *online* seharusnya juga diimbangi dan dipertimbangkan dengan terobosan baru agar dapat berjalan dengan sejalan dan lancar antara kehadiran transportasi *online* dan tukang becak. Hal tersebut dapat dibuat kebijakan seperti:

1. Dibuatkannya Aplikasi Transportasi *Online* juga kepada tukang becak
2. Pemberdayaan tukang becak dengan dimanfaatkannya jasa mereka dalam suatu wisata
3. Pemberdayaan tukang becak dengan diberlakukannya pada suatu tata ruang wilayah
4. Pengalihan profesi jika hal tersebut dimungkinkan. Akan tetapi harus diimbangi dengan pengetahuan dan wawasan yang perlu dilakukan, seperti sosialisasi atau kursus.
5. Pemenuhan kebutuhan pokok berupa jaminan sosial bagi tukang becak yang belum mendapatkan penghasilan secara normal
6. Pembuatan rute becak untuk beroperasi di wilayah desa.

Dalam perspektif hukum kesejahteraan sosial, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk tukang becak, mendapatkan perlindungan sosial yang memadai agar dapat mempertahankan taraf hidup yang layak. Prinsip tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, dalam konteks perubahan sosial akibat digitalisasi transportasi, pemerintah harus mengambil langkah afirmatif guna menghindari marginalisasi kelompok rentan seperti tukang becak. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan keberadaan becak ke dalam sistem transportasi yang lebih modern dan berkelanjutan. Jika negara gagal menjalankan kewajibannya, maka dapat terjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi dan sosial yang telah dijamin dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Selain itu, dalam kajian *maqashid al-shariah*, aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial. Islam mengajarkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya, terutama dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Dalam hal ini, keberlanjutan profesi tukang becak dapat diperkuat melalui kebijakan yang berorientasi pada inklusivitas ekonomi, seperti penyediaan program pemberdayaan dan insentif khusus bagi pelaku usaha transportasi tradisional. Implementasi

kebijakan ini harus mempertimbangkan prinsip keadilan distributif agar kelompok rentan tidak semakin termarginalisasi oleh dominasi kapitalisme digital. Dengan demikian, *maqashid al-shariah* dapat menjadi paradigma hukum yang mengarahkan pembentukan regulasi yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Lebih lanjut, asas proporsionalitas dalam hukum administrasi negara mengharuskan pemerintah untuk membuat kebijakan yang seimbang antara kepentingan modernisasi transportasi dengan perlindungan hak-hak tukang becak. Penerapan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak dapat diwujudkan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, penyedia layanan transportasi *online*, dan komunitas tukang becak. Beberapa strategi yang dapat dilakukan mencakup pengembangan aplikasi transportasi berbasis digital khusus untuk becak, integrasi layanan becak dalam sektor pariwisata, serta pembentukan jalur khusus yang memungkinkan becak tetap beroperasi secara optimal. Jika pendekatan ini diterapkan secara efektif, maka konflik kepentingan antara moda transportasi tradisional dan modern dapat diminimalisir, serta keadilan sosial yang menjadi amanat sila kelima Pancasila dapat diwujudkan secara nyata. Dengan demikian, negara dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak menjadi alat eksklusif sosial, melainkan sebagai instrumen inklusif yang memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial, dalam hal ini diperlukan kebijakan yang seimbang antara kemajuan teknologi transportasi dan perlindungan hak-hak kelompok rentan, termasuk tukang becak. Kehadiran moda transportasi *online* seharusnya tidak mengakibatkan eksklusif sosial bagi tukang becak, melainkan diiringi dengan regulasi yang mengakomodasi hak mereka berdasarkan prinsip kesejahteraan dan keadilan distributif. Dalam konteks hukum hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak atas pekerjaan yang layak sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Prinsip *good governance* menuntut pemerintah bertindak transparan dan akuntabel dalam merancang kebijakan yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi regulasi yang adil, seperti pelatihan keterampilan dan integrasi sistem transportasi tradisional dengan ekosistem digital, menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatif perubahan struktural ekonomi.

Perlindungan hak kesejahteraan sosial bagi tukang becak merupakan tanggung jawab negara guna memastikan keberlanjutan hidup mereka di tengah perkembangan transportasi digital. Kebijakan yang adaptif dan berkeadilan perlu dikembangkan untuk mencegah marginalisasi tukang becak, termasuk melalui pemberdayaan ekonomi dan integrasi becak dalam sistem transportasi modern. Dalam perspektif *maqashid al-shariah*, prinsip perlindungan jiwa dan harta menuntut negara untuk mengakomodasi kesejahteraan kelompok rentan melalui regulasi yang berpihak pada keadilan sosial. Implementasi kebijakan berbasis proporsionalitas dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta komunitas tukang becak dapat menjadi solusi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, kemajuan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi transportasi, tetapi juga memperkuat keadilan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdissalam, Izzudin Bin. 1991. *Qawaid Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*. 1st–7th ed. Kairo: Dar Ummul Quro.
- Ahmad Muntaha AM dan M. Hamim HR. 2013. *Pengantar Kaidah Fiqh Syafi'iyah: Penjelasan Nadzom Al-Fara'id Al-Bahiyah*. Kediri: Santri Salaf Press.
- Arafat, Yasir. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dan Perubahannya*.
- Baskoro., Ranga. 2020. *Becak Kalah Saing, Udin Terpaksa Menyambung Hidup Dengan Mencari Kayu Bakar*.
- Bayu N. 2021. *Hidup Segan Mati Tak Mau, Nasib Si Pengayuh Roda Tiga*.
- Databoks, Viva Budy Kusnandar. 2023. *Databoks Berapa Pangsa Pasar Jasa Layanan Transportasi Online Indonesia? Pangsa Pasar Jasa Layanan Transportasi Online Kawasan Asia Tenggara (2015-2025)*.
- Dimas Jarot Bayu. 2020. *Grab Dan Gojek, Layanan Transportasi Online Paling Populer Di Masyarakat*.
- Dwi Hadya Jayani. 2019. *Inilah Potensi Pendapatan Transportasi Online Dari Masa Ke Masa*.
- Hamdan. 2016. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Tasamuh* 14(1).
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2020. "No Title The Urgency of Maqasid Al-Shariah Reconsideration in Islamic Law Establishment for Muslim Minorities in Western Countries." *International Journal of Innovation, Creativity*

and Change 12(9): 388–404.

Moh Nasuka. 2017. “No Title.” *Maqasid Syari’ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem, Praktik, dan Produk Perbankan Syari’ah* 16(1).

Muhammad Daud Ali. 200AD. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Musdah Mulia. 2010. *Islam & Hak Asasi Manusia: Konsep Dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka.

Chelin Indra Sushmita. 2020. *Cerita Pulu Tukang Becak: Sepi, Pendapatan Tak Sampai Rp10.000 Sehari*.

Ronald Seger Prabowo. 2021. *Pilu! Sepi Penumpang Dan Penghasilan Menurun, Tukang Becak 78 Tahun Ini Diusir Anaknya*.

SF Marbun. 2004. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Publisher.

Susana Martínez-Rodríguez. 2016. “Creating the Sociedad de Responsabilidad Limitada: The Use of Legal Flexibility in Spanish Company Law, 1869-1953.” *The Business History Review* 90(2): 227–49.